

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh :**

**Novia Vina Damayanti**

**NIM. 31401800124**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2022**

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh :**

**Novia Vina Damayanti**

**NIM. 31401800124**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet)**

Disusun Oleh :

**Novia Vina Damayanti**

NIM : 31401800124

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 17 Januari 2022

Pembimbing

Rustam Hanafi

2022.01.18

18:00:24

+07'00'

Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Ak., CA

NIK. 211496007

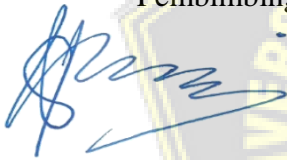
**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet)**

**Disusun oleh :  
Novia Vina Damayanti  
NIM : 31401800124**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal 07 Februari 2022

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing



RustamHanafi  
2022.02.08  
16:56:24  
+07'00'

Rustam Hanafi, SE, MSc, Ak, CA  
NIK. 211496007

Penguji I

Luluk

Digitally signed  
by Luluk

Muhimata

Muhimatul Ifada  
Date: 2022.02.04

tul Ifada 12:44:37 +07'00'

Dr. Hj. Luluk M. Ifada, SE, MSi, Akt, CA, CSRS  
NIK. 210403051

Penguji II



Digitally signed by Sri Dewi  
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC., CRP.  
DN: cn=Sri Dewi  
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC., CRP.,  
o=Unissula, ou=Fakultas Ekonomi,  
email=sriidewi@unissula.ac.id, c=ID  
Date: 2022.02.07 15:36:58 +07'00'

Sri Dewi Wahyundaru, SE, MSi, Ak, CA, ASEAN CPA, CRP  
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Tanggal 14 Februari 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si, Akt, CA, CSRS  
NIK. 2114415029

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Vina Damayanti

NIM : 31401800124

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Dempet)”** merupakan

hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi. Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 17 Januari 2022



Novia Vina Damayanti

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Vina Damayanti  
NIM : 31401800124  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat Asal : Kedungori RT 06/ RW 02 Kec. Dempet Kab. Demak  
No. HP/Email : 089619720717 / [noviavina551@gmail.com](mailto:noviavina551@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul : **“PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN DEMPET)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Juli 2022



(Novia Vina Damayanti)

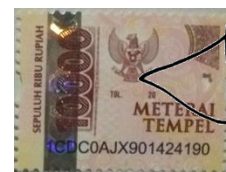
## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Vina Damayanti  
NIM : 31401800124  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat Asal : Kedungori RT 06/ RW 02 Kec. Dempet Kab. Demak  
No. HP/Email : 089619720717 / [noviavina551@gmail.com](mailto:noviavina551@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul : **“PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN DEMPET)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Juli 2022



Novia Vina Damayanti

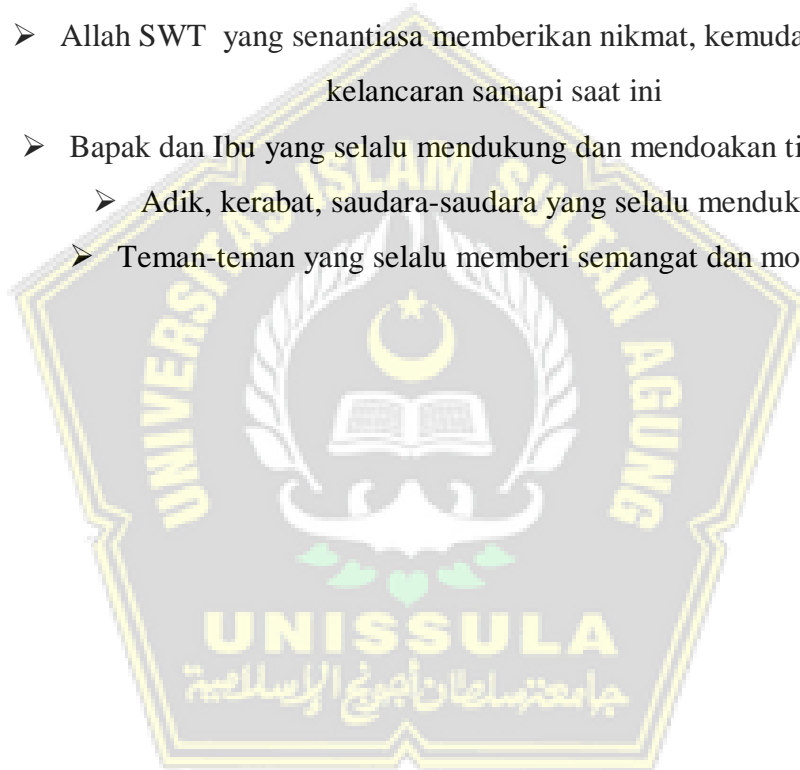
## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

- Kepanikan adalah separuh penyakit, Ketenangan adalah separuh obat, dan Kesabaran adalah permulaan kesembuhan
- Setiap masalah pasti ada solusinya. Untuk itu tetaplah berusaha dan berdoa

### **PERSEMBAHAN:**

- Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, kemudahan, serta kelancaran samapi saat ini
- Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan tiada henti
  - Adik, kerabat, saudara-saudara yang selalu mendukung
  - Teman-teman yang selalu memberi semangat dan motivasi





## ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang menggambarkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jumlah sampel 70 aparatur desa di desa se-Kecamatan Dempet. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sanksi Administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**Kata Kunci:** *Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sanksi Administrasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*



## ABSTRACT

*Accountability is a form of accountability that is carried out periodically which describes a success or failure in achieving predetermined goals and objectives. This study aims to examine the effect of Competency of Village Fund Management Apparatus, Utilization of Information Technology, Community Participation, Internal Control System, and Application of Administrative Sanctions on Accountability of Village Fund Management. The sampling method in this study used census method with a sample of 70 village officials in villages throughout the Dempet sub-district. This study uses hypothesis testing, and the results of this study indicate that the Competence of Village Fund Management Apparatus, Community Participation, Internal Control System, and Application of Administrative Sanctions have a significant positive effect on Village Fund Management Accountability. But Utilization of Information Technology does not have a significant positive effect on Village Fund Management Accountability.*

**Keywords:** *Competency of Village Fund Management Apparatus, Community Participation, Internal Control System, Application of Administrative Sanctions, and Accountability of Village Fund Management.*



## INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah Kecamatan Dempet merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak dengan selisih dana desa lebih anggaran (SilPA) yang cukup signifikan. Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan jika terdapat selisih dana desa lebih anggaran (SilPA) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum optimal. Untuk itu penulis ingin mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa agar dapat optimal.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Enggar Wahyuning Pahlawan (2020). Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, tahun pengamatan, dan penambahan variabel independen. Objek penelitian sebelumnya yaitu Pemerintah Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020, sedangkan objek penelitian ini yaitu Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada tahun 2021 serta adanya penambahan variabel Penerapan Sanksi Administrasi.

Data penelitian menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada Aparatur Desa. Teknik sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode sensus dengan jumlah sampel 70 aparatur desa di desa se-Kecamatan Dempet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan penerapan sanksi administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Dempet)”.


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan laporan skripsi ini, tentu tidak luput dari kendala. Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kendala tersebut. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, diantaranya :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si., Akt., CA., CSRS selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
3. Bapak Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Devi Permatasari, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali

5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya, dan telah membantu kelancaran selama menempuh studi di Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak, Ibu, Adik, Keluarga, dan Teman-Teman tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas segala kebaikan mereka yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui bahwa skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Sehingga kritikan dan masukan diharapkan demi sempurnanya skripsi ini kedepannya. Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Semarang, 17 Januari 2022  
Penyusun,



Novia Vina Damayanti  
NIM. 31401800124

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
INTISARI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Grand Theory .....	11
2.2 Variabel Penelitian .....	13
2.3 Telaah Penelitian Terdahulu .....	17
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	20
2.5 Kerangka Penelitian.....	27
BAB II METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Populasi Dan Sampel.....	29
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Variabel Dan Indikator .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.2 Analisis Data .....	47
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
BAB V PENUTUP .....	66
5.1 Simpulan .....	66
5.2 Implikasi .....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN .....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Kabupaten Demak .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Populasi Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Skala Likert.....	32
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Dempet Menurut Desa .....	40
Tabel 4.2 Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dempet.....	41
Tbale 4.3 Data Penyebaran Kuesioner .....	43
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	44
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	45
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Bekerja.....	45
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	46
Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas .....	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas .....	52
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	53
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F .....	56
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	57
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik T.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	20
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian .....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi.....	72
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian .....	73
Lampiran 3. Tabulasi Data Responden .....	79
Lampiran 4. Hasil Uji SPSS .....	90
Lampiran 5. Dokumentasi Pengisian Kuesioner .....	98



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata di seluruh wilayah Indonesia terutama pada daerah yang masih belum cukup akses baik dari segi sarana maupun prasarana. Selain itu, tujuan dari pembangunan tersebut juga sebagai upaya untuk menggali potensi yang dimiliki desa. Pembangunan desa juga memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dikelola dengan baik, atau dalam istilah disebut kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan suatu kebijakan dimana pemerintah daerah memperoleh hak untuk mengatur serta menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Busrizalti, 2013). Kebijakan tersebut bertujuan agar pengelolaan dana desa dapat terealisasi secara optimal. Berdasarkan Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa dimana pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana Desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) pemerintah telah memberikan anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Jika diperhatikan dana desa yang dianggarkan pemerintah terdapat

kenaikan sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Dengan adanya penambahan dana desa tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi desa.

Dana desa yang sudah dianggarkan tersebut, masing-masing akan disalurkan dari pemerintah pusat ke setiap desa melalui pemerintah daerah. Adapun dana desa yang dianggarkan di Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar Rp 98 miliar, dengan rincian Alokasi Dana Desa Siltap (ADD Siltap) sebesar Rp 68,64 miliar, Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) sebesar Rp 14,67 miliar, dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar Rp 11,74 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN yang disalurkan ke masing-masing desa dengan tujuan utama untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (BPK, 2020). Berikut merupakan data rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2020.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa Kabupaten Demak**

No	Kecamatan	Alokasi Dana Desa	SilPA per tahun	Realisasi Dana Desa
1	Mranggen	8.167.763.679	75.756.771	8.092.006.908
2	Karangawen	6.547.774.037	132.574.253	6.415.199.784
3	Guntur	7.770.011.862	340.905.222	7.429.106.640
4	Sayung	8.786.015.998	37.878.358	8.748.137.640
5	Karangtengah	6.556.490.891	132.574.253	6.423.916.638
6	Wonosalam	7.203.038.625	132.574.253	7.070.464.372
7	Dempet	6.327.230.860	227.270.148	6.099.960.712
8	Gajah	6.119.120.398	340.905.222	5.778.215.176
9	Karanganyar	7.361.141.308	303.026.864	7.058.114.444
10	Mijen	5.708.756.665	284.087.685	5.424.668.980
11	Demak	5.578.784.769	132.574.253	5446.210.516
12	Bonang	9.216.258.520	227.270.148	8.988.988.372

13	Wedung	7.626.957.504	303.026.864	7.323.930.640
14	Kebonagung	5.030.654.884	265.148.506	4.765.506.378
<b>Jumlah</b>		<b>98.000.000.000</b>	<b>2.935.572.800</b>	<b>95.064.427.200</b>

*Sumber : Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020*

Tingginya dana yang dianggarkan oleh pemerintah mengharuskan setiap desa untuk mengalokasikan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Karena jika dana tersebut tidak terealisasi secara optimal dikhawatirkan adanya kecurangan atau penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika dilihat dari informasi tersebut menunjukkan adanya sisa anggaran dana yang relatif tinggi yaitu mencapai Rp 2,93 miliar.

Kabupaten Demak terdiri dari beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Dempet. Kecamatan Dempet terdiri dari 16 Desa, dimana dana desa yang dianggarkan di Kecamatan Dempet termasuk kategori menengah. Adapun dana desa yang dianggarkan di Kecamatan Dempet yakni sebesar Rp 6,32 miliar, namun dari dana yang dianggarkan tersebut diketahui bahwa Kecamatan Dempet masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp 227,27 juta. Menurut Rismawati (2019) adanya selisih dana desa lebih anggaran (SilPA) tersebut dapat mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum terlaksana dengan optimal. Oleh karena itu, agar pengelolaan dana desa dapat terealisasi secara optimal, maka terdapat faktor penentu yang menunjang keberhasilannya. Faktor yang pertama yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa. Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan indikator atau faktor yang dinilai mampu mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparat pengelola desa dinilai cukup penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena aparat pengelola dana desa yang berkompeten

diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabel (Pahlawan et al., 2020).

Faktor yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja, baik pemerintah maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, 2012). Bentuk pengaplikasian teknologi informasi yaitu dengan menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan desa. Penggunaan komputer dinilai mampu menggandakan kinerja manusia, serta dinilai mampu mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pelaporan dana desa diharapkan dapat lebih efektif serta output laporan keuangannya juga lebih handal jika dibandingkan dengan pelaporan secara manual (Sarah et al., 2020).

Faktor yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam rangka program pembangunan maupun pengembangan desa, maka masyarakat dapat ikut andil atau berpartisipasi dalam pembuatan keputusan maupun terlibat dalam mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya

partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan desa akan terhambat (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Faktor keempat yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat mencegah maupun mendeteksi adanya *fraud* (Aziiz, 2019).

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu penerapan sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Abarang, 2019). Penerapan sanksi administrasi yang tegas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, meminimumkan selisih dana desa lebih anggaran (SilPa), serta diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi poin penting bagi aparat pengelola dana desa, karena keberhasilan dan tanggungjawab mereka dalam mengelola dana desa dapat tercermin dari akuntabilitas pengelolaan dana desa itu sendiri (Pahlawan et al., 2020). Selain itu, akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa aparat pengelola dana desa telah menjalankan tugasnya dengan benar, etis dan bertanggungjawab dalam mengelola dana desa. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat dijadikan sebagai indikator bagi aparat pengelola dana desa atas tanggungjawab dalam pekerjaan mereka.

Beberapa topik penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa, diantaranya yaitu Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun terdapat juga penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah et al., 2020).

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh Enggar Wahyuning Pahlawan (2020) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun persamaan penelitian ini yaitu menerapkan semua variabel yang ada serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Tetapi yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu yang *pertama*, adanya penambahan variabel penerapan sanksi administrasi, karena dengan penerapan sanksi administrasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan keakuratan hasil pelaporan keuangan desa. Sanksi



administrasi merupakan suatu sanksi yang dikenakan atas suatu pelanggaran administrasi tertentu maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat administratif. Sanksi administrasi sangat penting diterapkan dalam menyelenggaraan tata kelola dana desa, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa sehingga perlu adanya sanksi administrasi agar tidak terjadi pelanggaran tertentu.

Perbedaan yang *kedua* yakni objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa se-Kecamatan Dempet. Pemilihan objek penelitian ini karena terdapat suatu permasalahan, dimana Kecamatan Dempet ini tergolong salah satu kecamatan dengan sisa anggaran dana desa yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 227,27 juta. Adanya sisa lebih anggaran dana desa tersebut, dapat mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum maksimal (Rismawati, 2019). Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi, Kecamatan Dempet juga memiliki sebuah keterbatasan dimana beberapa desa yang ada di kecamatan ini dikatakan masih terdapat beberapa permasalahan seperti pemerataan pembangunan yang masih belum optimal, seperti yang terdapat pada Desa Baleromo, Desa Kebonsari, dan Desa Kedungori.

Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap**

## **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menguji :

- a. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- c. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- d. Apakah sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- e. Apakah penerapan sanksi administrasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

- c. Menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- e. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Secara Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan serta tanggung jawab pemerintah desa, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2) Manfaat Secara Praktis**

- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi Pemerintah Desa mengenai bagaimana sikap dan hal apa saja yang seharusnya dilakukan atau diterapkan agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal.
- Bagi peneliti, sebagai sarana memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, terutama tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama kepada para aparaturnya pengelola dana desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Grand Theory

##### *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori Agensi adalah teori yang mendeskripsikan keterkaitan antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat atau tanggung jawab kepada *agent*, sedangkan *agent* adalah pihak yang diberikan amanat atau pihak yang bertanggung jawab atas amanat dan tugas yang diberikan oleh *principal*. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah masyarakat, sedangkan *agent* adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kepala desa beserta aparatur desa lainnya. *Principal* berusaha mencari informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah selaku *agent*, terkait dengan pengelolaan dana yang ada pada perusahaan maupun institusi. Dalam hal ini, dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban kepada *agent*. Teori agensi menganalisis serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* dan *agent*. Jadi pada dasarnya, inti dari Teori Agensi adalah suatu desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan atau mencari solusi atas konflik kepentingan yang terjadi antara pihak *principal* dan *agent* (Scott, 1997).

Implementasi teori agensi bagi penelitian ini yaitu berkaitan dengan praktek pengelolaan keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa, pemerintah desa sebagai *agent* yang bertindak dalam mengelola serta bertanggung jawab atas dana desa harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi *principal* yakni laporan keuangan. Informasi laporan keuangan yang disajikan juga harus

memperhatikan prinsip relevansi, transparansi, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pihak prinsipal. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang diciptakan pemerintah desa. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut, tentu dibutuhkan kompetensi yang memadai dari aparat pengelola dana desa. Sehingga apabila pemerintah desa telah berhasil menyajikan laporan keuangan desa yang berkualitas, tentu hal tersebut dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait masalah ekonomi, sosial, maupun politik (Sarah et al., 2020). Dalam hal ini, masyarakat dapat ikut andil maupun berpartisipasi dalam memberikan kritikan dan saran dalam upaya meningkatkan pembangunan desa serta masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dimasa yang akan datang.

Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas kepada prinsipal, perlu adanya sebuah kontrol yang baik bagi pemerintah desa, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Teori ini mengharapkan dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan maupun untuk mengurangi bentuk kecurangan yang lain. Sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi atau instansi harus dipatuhi oleh setiap karyawan/pegawai demi terlaksananya kewajiban maupun tanggung jawab pemerintah desa dengan baik.

Peranan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa yaitu memudahkan tugas dan tanggung jawab aparat pengelola dana desa dalam rangka

mengelola dana desa hingga menyajikan laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan desa kepada prinsipal. Sedangkan penerapan sanksi administrasi dalam pengelolaan dana desa berperan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga adanya SiPA (selisih dana desa lebih anggaran) dapat diminimumkan, serta berdampak pada peningkatan akuntabilitas itu sendiri.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat menunjukkan performa seseorang atau pimpinan pada sebuah organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya (Sarah et al., 2020). Dalam hal ini, akuntabilitas yang optimal dapat terwujud apabila pemerintah desa memiliki kesadaran akan kewajiban mereka dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan optimal serta melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh

terhadap laporan keuangan desa karena hal tersebut mencerminkan kinerja serta tanggung jawab pemerintah atas realisasi dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat.

### **2.2.2 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa**

Kompetensi merupakan spesifikasi yang dimiliki seseorang baik berupa keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Kompetensi sangat diperlukan bagi aparatur desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Karena dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, perilaku, serta ketrampilan yang dimiliki aparatur desa, dapat mendorong tercapainya tujuan tersebut (Rismawati, 2019). Menurut Dara Fitrinanda (2020) pengembangan kompetensi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan jumlah tenaga kerja. Sehingga hal ini akan berdampak positif bagi aparat desa, karena apabila aparat desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa serta terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang pada akhirnya aparatur tersebut memiliki ketrampilan yang memadai. Dengan keterampilan yang dimiliki juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap aparat desa tersebut.

### **2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi adalah sarana dan prasarana baik dalam bentuk *software*, *hardware*, dan *useware* yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menfasirkan, menyimpan, mengorganisasikan, serta menggunakan data secara bermakna (Pahlawan et al., 2020). Komponen dari



teknologi informasi itu sendiri dapat berupa komputer. Dengan memanfaatkan komputer, seseorang dapat dengan mudah untuk mengerjakan sesuatu serta meningkatkan kualitas pekerjaan tersebut (Rismawati, 2019). Teknologi informasi juga berperan peran penting dalam upaya meningkatkan layanan di sektor publik. Dalam kaitannya dengan kegiatan administrasi, manajemen keuangan, dan pendaftaran populasi, terutama untuk populasi masyarakat besar sangat membutuhkan adanya teknologi yang handal. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi juga dapat membantu dan mempermudah dalam meningkatkan keakuratan data, sehingga berguna bagi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan (Fitrianda, 2020).

#### **2.2.4 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Umaira (2019) terdapat beberapa pengertian mengenai partisipasi yaitu: *pertama*, partisipasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penentuan alternatif masyarakat mengenai gagasan/ide dengan tujuan untuk kepentingan bersama guna kemajuan dan arah pembangunan desa. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam pelaksanaan suatu program, seperti: menggerakkan sumber daya serta berkoordinasi dan mengusulkan suatu program. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat, hal ini terkait dengan hasil atas pencapaian program yang sudah direncanakan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan, serta dapat menghindari adanya penyimpangan. Sehingga meningkatnya

akuntabilitas dapat tercapai apabila terdapat keterlibatan peran masyarakat sebagai bentuk respon masyarakat akan keraguan mereka terhadap pemerintah. Hal ini karena jika ditinjau dari jarak antara pemerintah desa dan warga masyarakat yang cukup dekat, dapat menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab (Rismawati, 2019).

### **2.2.5 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya dalam suatu organisasi (Aziiz, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sistem pengendalian internal berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Rismawati, 2019).

### **2.2.6 Penerapan Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Abarang, 2019). Pemberlakuan sanksi administrasi yaitu apabila terdapat penyelewengan maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Peran sanksi administrasi dalam

kaitannya dengan pengelolaan dana desa yaitu, setiap kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus bertumpu pada suatu prinsip, serta kegiatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Sehingga sangat penting bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola serta bertanggung jawab dengan sebaik mungkin atas alokasi dana desa, dimana hal tersebut juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Penerapan sanksi administrasi digunakan sebagai tolak ukur bahwasanya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip yang berlaku, dan jika terjadi kecurangan maupun tindakan yang tidak seharusnya terjadi, maka disinilah peran sanksi administrasi yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa tersebut.

### 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang akunbalitis pengelolaan dana desa yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang relevan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita	Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal,	Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap

	Wijayanti, dan Suhendro (2020)	pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019)	Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan spi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu	Kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan spi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Dara Fitrianda, Linda, dan Maya Febrianty (2020)	Pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Pengelolaan keuangan desa	Kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa
5	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi,	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi

	dan Hendrik Gamaliel (2017)	Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6	Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017)	Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
7	Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarepati (2017)	Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Kompetensi aparatur secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan spi secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8	Siti Umaira dan Adnan (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)	Partisipasi masyarakat, kompetensi sdm, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
9	Muhammad Nur	Faktor-Faktor yang	Kompetensi aparat desa,

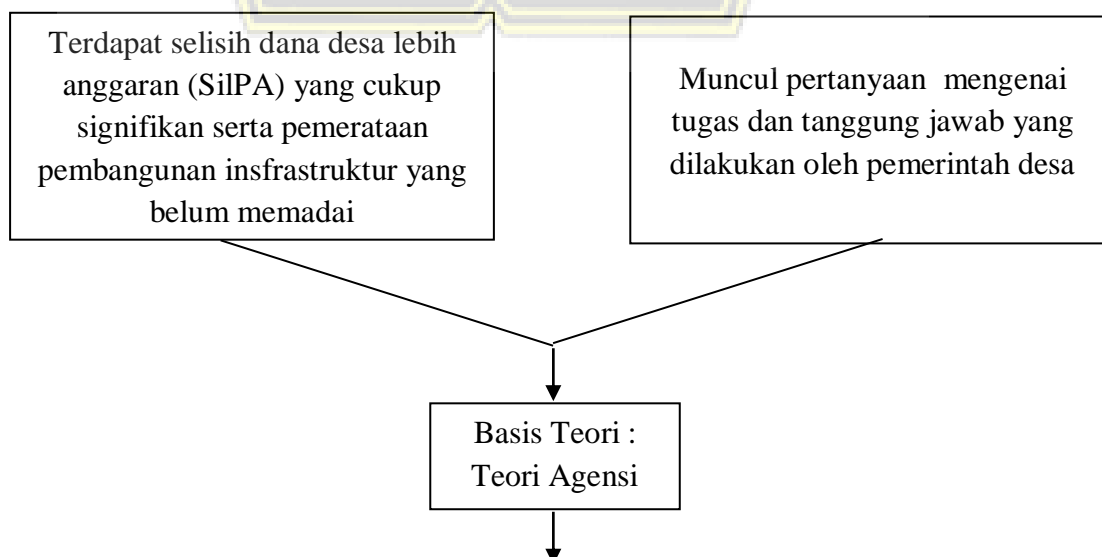
	Aziz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019)	Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	pemanfaatan teknologi informasi, dan spip berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa
10	Tika Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

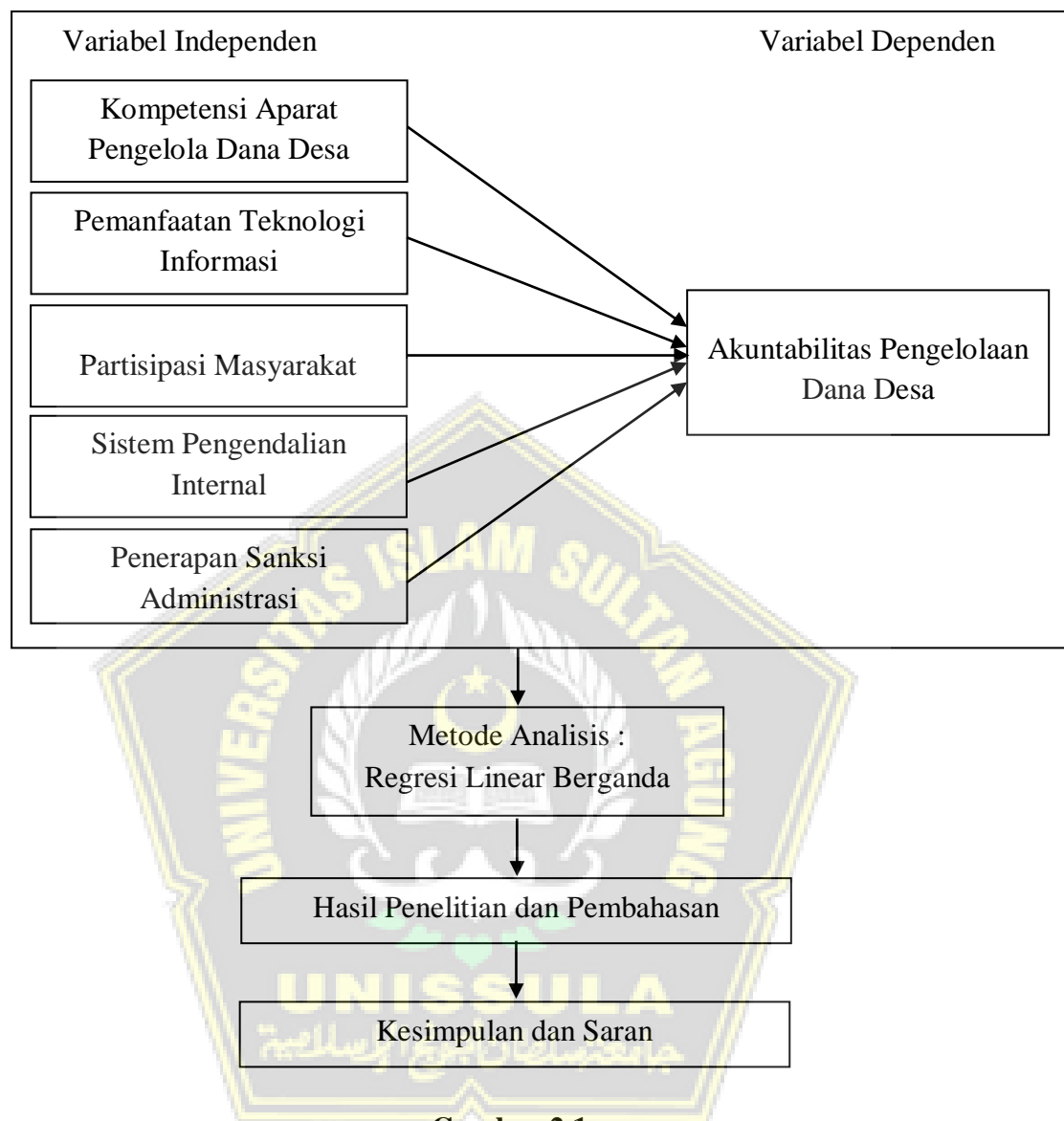
## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran Teoritis penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut ini.

#### Skema Kerangka Pemikiran





#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan dalam penelitian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang perlu dilakukan pengujian. Dengan demikian ada keterkaitan antara rumusan masalah dengan hipotesis karena rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian (Saebani, 2013). Adapun hipotesis penelitian ini antara lain:

## **1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan keahlian yang diperlukan oleh seorang aparatur desa seperti pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan intelektual dalam rangka pengelolaan dana desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara optimal (Rismawati, 2019). Peran pemerintah desa sebagai steward bagi masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan dana desa agar dapat teralokasi dengan baik demi kepentingan publik.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa (Umaira 2019). Aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut. Namun sebaliknya, jika aparatur desa tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020), Atiningsih (2019) dan Sarah (2020) yang mengemukakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:



*H1: Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja, baik pemerintah maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, 2012). Dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi dapat menunjang aparatur dalam mengelola dan melaporkan pengelolaan dana desa. Dimana hal tersebut sesuai dengan teori agensi yaitu teknologi informasi dapat membantu dan memudahkan aparat pengelola dana desa dalam menjalankan kewajiban sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Rismawati, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan dana desa. Dari segi manfaat, teknologi informasi memiliki kelebihan dalam keakuratan hasil operasi datanya sekaligus hal tersebut juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data, baik disengaja maupun tidak disengaja (Sarah et al., 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2020), Fitrinanda (2020), dan Ekasari (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

### **3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai bentuk kontribusi masyarakat, baik dari segi pikiran, tenaga, waktu, pengalaman, modal, maupun partisipasi dalam hal penggunaan hasil pembangunan (Fitrinanda, 2020). Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka program pembangunan maupun pengembangan desa, maka masyarakat dapat ikut andil atau berpartisipasi dalam pembuatan keputusan maupun terlibat dalam mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada di masyarakat (Atiningsih 2019).

Dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan, akuntabilitas menjadi suatu hal penting untuk dipertimbangkan. Setiap keputusan yang akan diambil oleh aparatur desa hendaknya melibatkan masyarakat. Hal ini karena masyarakat harus berperan serta dalam proses pemerintahan maupun dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan argument maupun pendapatnya kepada

keputusan pemerintah desa, dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, serta agar pemerintah lebih transparan dalam mempertanggung jawabkan semua kegiatannya (Sarah et al., 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020), Atiningsih (2019) dan Sarah (2020) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

#### **4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat mencegah maupun mendeteksi adanya *fraud* (Aziiz, 2019).

Sistem pengendalian internal perlu diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan, serta harus dipatuhi oleh seluruh pegawai maupun pimpinan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi/pemerintahan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, diharapkan penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan hingga pelaporan

keuangan lebih akurat dan akuntabel, sehingga dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut (Rismawati, 2019).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) dan Arif Widyatama (2017) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

## **5. Pengaruh Sanksi Administratif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan UU No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, menyatakan bahwa apabila terdapat SilPA Dana Desa secara tidak wajar, maka bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SilPA (selisih dana desa lebih anggaran). Adanya SilPA Dana Desa yang tidak wajar dapat terjadi karena penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dengan adanya pemberlakuan sanksi administratif diharapkan dapat meminimalkan terjadinya resiko kecurangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dari sisi aparat pengelola dana desa, dengan adanya sanksi tersebut juga dapat membantu mereka agar memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana desa yang berperan sebagai *steward* untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk sanksi administrasi (Rismawati, 2019). Penerapan sanksi administrasi merupakan faktor yang penting bagi pemerintah desa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dengan adanya pemberlakuan sanksi administrasi yang tegas dapat berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

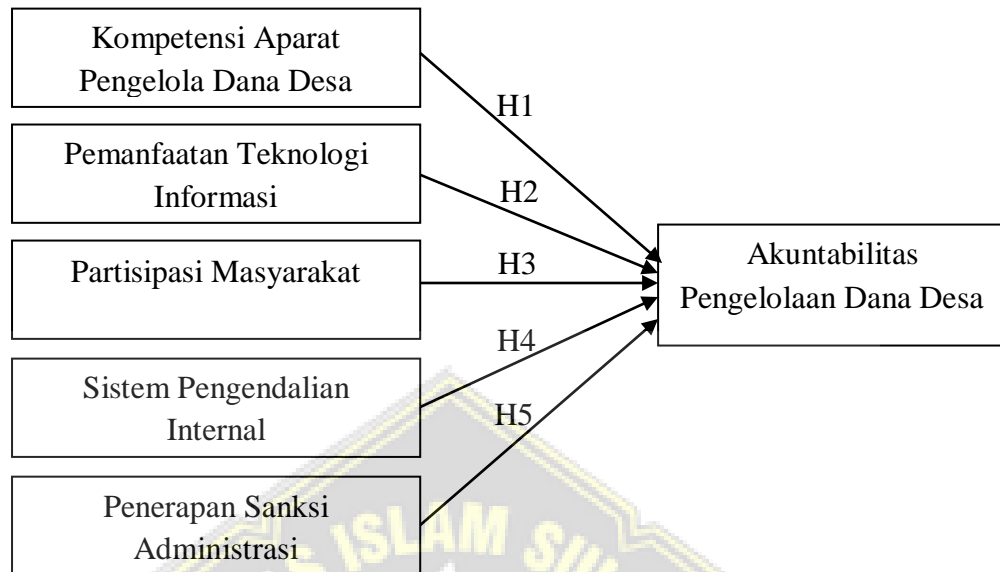
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lilis (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi sangat efektif diterapkan dalam rangka pengelolaan dana desa, khususnya melalui prinsip akuntabilitas publik dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan manajemen keuangan desa. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya sanksi administrasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H5: Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

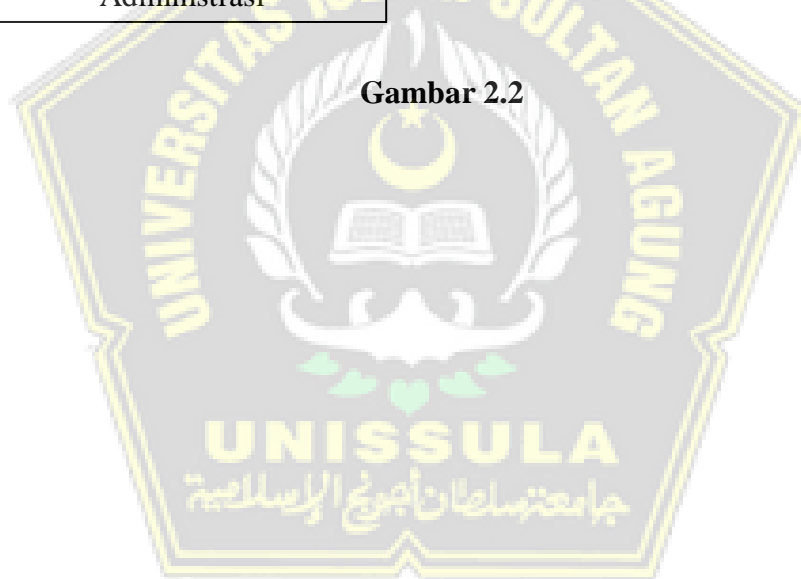
## **2.5 Kerangka Penelitian**

Kerangka Penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut.

### Skema Kerangka Penelitian



Gambar 2.2



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, menurut Rismawati (2019) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian dimana untuk memperoleh data-datanya dalam bentuk angka dan kalimat. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menghasilkan data yang berbentuk deskriptif yaitu suatu ulasan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan serta tingkah laku dari subjek yang diteliti. Alasan memilih penelitian deskriptif kuantitatif karena hasil dari penelitian ini, diperlukan sebuah deskripsi atau gambaran mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dempet, sehingga akan lebih sesuai jika digunakan pada penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah, dengan didukung dengan data yang dikumpulkan yaitu berupa angka dan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Sehingga dari deskripsi data-data yang diperoleh tersebut, dapat digunakan sebagai hasil penelitian.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi memiliki makna sebagai sekelompok unit dalam ruang lingkup tertentu yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai objek analisis penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah

Desa di Kecamatan Dempet yang mendapat dana desa. Berikut merupakan populasi dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian**

No	Desa
1	Merak
2	Botosengon
3	Jerukgulung
4	Kunir
5	Brakas
6	Balerejo
7	Baleromo
8	Kedungori
9	Kuwu
10	Kebonsari
11	Gempoldenok
12	Harjowinangun
13	Dempet
14	Kramat
15	Karangrejo
16	Sidomulyo

Tabel 3.1 tersebut menjelaskan jumlah populasi dalam penelitian ini, dimana populasi tersebut berjumlah 16 desa yang ada di Kecamatan Dempet.

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi dan dapat dijadikan sebagai wakil dari populasi (Rismawati, 2019). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode sensus atau sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2002:61-63) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus. Sehingga metode pengambilan sampel



dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sensus atau sampling jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan suatu fakta dari obyek yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Dempet. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan maksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti (Rismawati, 2019). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian (Rismawati, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang disebar kepada sampel penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey dan metode observasi.

#### **1) Metode Survey**

Metode survey dilakukan dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden. Kuesioner yang diberikan dapat berupa sebuah pernyataan yang berkaitan dengan kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, penerapan sanksi

administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis kuesioner pada penelitian ini yaitu kuesioner tertutup, dimana peneliti telah menyediakan jawaban dan responden hanya diminta untuk memberikan tanda check atau centang (✓) pada kolom yang sesuai. Adapun tolok ukur jawaban responden menggunakan skala *likert* dengan lima tingkat prefensi jawaban yang masing-masing memiliki skor 1 sampai 5 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Alternatif Jawaban Skala *Likert***

Alternatif jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Hasil pengisian kuesioner yang sudah dilakukan responden, nantinya akan diseleksi terlebih dahulu mengenai kelengkapan pengisian kuesioner tersebut, dengan tujuan apabila terdapat kuesioner yang kurang lengkap pengisiannya maupun tidak memenuhi kriteria, tidak disertakan dalam analisis.

## 2) Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti. Dengan metode ini, data yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan Dana Desa. metode ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lokasi penelitian, serta situasi dan kondisi pengelolaan dana desa secara lengkap dan obyektif. Sehingga dengan menggunakan metode ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai data mendukung atas informasi yang diperoleh, serta menyempurnakan hasil temuan dari teknik pengumpulan data yang lain.

### 3.5 Variabel dan Indikator

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang dimiliki seseorang baik berupa keterampilan ( <i>skill</i> ), pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), dan kemampuan ( <i>ability</i> ) untuk melaksanakan pekerjaan tertentu (Hevesi, 2005).	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Rismawati (2019) dengan indikator : 1. Pengetahuan 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian teknis 4. Kemampuan mencari solusi 5. Inisiatif dalam bekerja
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi Informasi adalah sarana dan prasarana baik dalam bentuk <i>software</i> , <i>hardware</i> , dan <i>useware</i> yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menfasirkan, menyimpan, mengorganisasikan, serta menggunakan data secara bermakna (Pahlawan et al., 2020).	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Rismawati (2019) dengan indikator : 1. Tersedianya jaringan internet 2. Pemanfaatan jaringan internet sesuai ketentuan 3. Adanya <i>software</i> atau aplikasi yang memadai 4. Proses pengelolaan data terkomputerisasi
Partisipasi	Partisipasi masyarakat	Mengacu pada penelitian yang

Masyarakat	merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tertentu maupun kondisi tertentu. Rismawati (2019).	dikembangkan oleh Rismawati (2019) dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dan program desa</li> <li>2. Memberikan usulan rencana anggaran</li> <li>3. Ikut serta dalam rapat paripurna</li> <li>4. Turut andil mengawasi dan melaporkan</li> <li>5. Menilai pelaksanaan anggaran</li> </ol>
Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang – undangan SPIP PP NO. 60 tahun (2008).	Mengacu pada SPIP PP NO. 60 tahun 2008 dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan pengendalian</li> <li>2. Penilaian risiko</li> <li>3. Kegiatan pengendalian</li> <li>4. Informasi dan komunikasi</li> <li>5. Pemantauan pengendalian intern</li> </ol>
Penerapan Sanksi Administrasi	Sanksi administratif merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Abarang, 2019).	Mengacu pada UU No. 60 Tahun 2014, indikator sanksi administrasi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pelaporan kinerja</li> <li>2. Realisasi ADD</li> <li>3. Kelengkapan pelaporan keuangan desa</li> </ol>
Akuntabilitas	Akuntabilitas ialah bentuk	Mengacu pada penelitian yang

Pengelolaan Dana Desa	pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2017).	dikembangkan oleh Rismawati (2019) dengan indikator : 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan
-----------------------	--	---

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data, menguraikan pola penelitian, menambahkan makna dari penelitian, serta mengidentifikasi hubungan antar berbagai konsep. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menguji apakah propitabilitas variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Atau dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan responden penelitian, baik berupa nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, jabatan, dan masa bekerja (Rismawati, 2019). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum (Rismawati, 2019).

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

#### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Pearson Correlation* dalam menguji validitas instrument penelitian dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dikatakan valid, sedangkan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dikatakan tidak valid (Pahlawan et al., 2020:162-172).

#### 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil jawaban kuesioner dari responden, apakah reliabel atau tidak. Suatu variabel dikatakan reliabel jika *cronbach alpha* memiliki nilai  $> 0,70$  (Imam, 2018).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu pengujian data yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi data normal ataupun mendekati normal (Imam, 2013).

#### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antar variabel independennya (Pahlawan et al., 2020:162-172).

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarah et al., 2020:336). Hasil uji ini dapat diketahui dengan melihat grafik Uji *Scatterplot*.

#### 3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) (Rismawati, 2019:43). Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengetahui korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah memiliki korelasi positif atau negative, serta dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sanksi administrasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut persamaan untuk analisis regresi linear berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = akuntabilitas pengelolaan dana desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Kompetensi aparat pengelola dana desa

X2 = Pemanfaatan teknologi informasi

X3 = Partisipasi Masyarakat

X4 = Sistem Pengendalian Internal

X5 = Penerapan sanksi administrasi

e = Error term.

### 3.6.5 Uji Kebaikan Model

#### a) Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel *anova* dari persamaan regresi, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (Pahlawan et al., 2020:162-172), artinya kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan penerapan sanksi administrasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020:162-172).
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (Pahlawan et al., 2020:162-172), artinya kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan penerapan sanksi administrasi secara simultan tidak



berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020:162-172).

#### **b) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Pahlawan et al., 2020:162-172).

### **3.6.6 Uji Hipotesis**

#### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) mengetahui kemampuan dari variabel independen secara individu dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Pahlawan et al., 2020:162-172).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Dempet merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah Kecamatan Dempet berbatasan dengan Kecamatan Gajah, sebelah timur berbatasan dengan Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebonagung, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam. Luas wilayah Kecamatan Dempet adalah 61,62 km<sup>2</sup>. Kecamatan Dempet dengan daerah agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Dempet terdiri atas lahan sawah yang mencapai 4.343,10 hektar, dan selebihnya adalah lahan kering seluas 1.818,60 hektar.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Dempet Menurut Desa**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)
1	Merak	4,88	3.883
2	Karangrejo	3,39	2.054
3	Sidomulyo	5,20	4.063
4	Botosengon	1,59	2.606
5	Jerukgulung	3,49	2.099
6	Kunir	5,66	3.622
7	Brakas	2,95	2.548
8	Balerejo	5,08	3.822
9	Baleromo	4,02	3.185
10	Kedungori	3,46	3.011
11	Kuwu	2,44	3.093
12	Kebonsari	3,23	1.792
13	Gempoldenok	2,27	1.487
14	Harjoinangun	5,13	5.257

15	Kramat	4,82	4.038
16	Dempet	4,01	7.099
JUMLAH		61,62	53.609

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2020

Secara administrasi wilayah Kecamatan Dempet terdiri dari 16 Desa, 50 Dusun, serta 63 Rukun Warga dan 34 Rukun Tetangga. Jumlah desa yang memiliki dusun terbanyak yaitu di Desa Kunir yang berjumlah 7 dusun.

**Tabel 4.2**  
**Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dempet**

No	Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1	Merak	323.064.000	60.402.732	43.263.000	426.729.732	426.729.732
2	Karangrejo	247.680.000	60.402.732	30.496.000	338.578.732	338.578.732
3	Sidomulyo	347.508.000	60.402.732	77.751.000	504.600.911	485.661.732
4	Botosengon	174.840.000	60.402.732	25.417.000	279.598.911	260.659.732
5	Jerukgulung	250.212.000	60.402.732	38.050.000	348.664.732	348.664.732
6	Kunir	369.120.000	60.402.732	53.481.000	501.942.911	483.003.732
7	Brakas	201.708.000	60.402.732	47.398.000	328.447.911	309.508.732
8	Balerejo	347.412.000	60.402.732	59.257.000	486.010.911	467.071.732
9	Baleromo	272.004.000	60.402.732	48.433.000	399.778.911	380.839.732
10	Kedungori	274.488.000	60.402.732	38.732.000	392.561.911	373.622.732
11	Kuwu	223.464.000	60.402.732	52.540.000	355.345.911	336.406.732
12	Kebonsari	250.212.000	60.402.732	36.110.000	365.663.911	346.724.732
13	Gempoldenok	223.416.000	60.402.732	31.029.000	333.786.911	314.847.732
14	Harjoinangun	296.292.000	60.402.732	52.713.000	428.346.911	409.407.732
15	Kramat	369.120.000	60.402.732	52.623.000	501.084.911	482.145.732
16	Dempet	199.248.000	60.402.732	76.436.000	336.086.732	336.086.732
<b>Jumlah</b>		<b>4.369.788.000</b>	<b>966.443.000</b>	<b>763.729.000</b>	<b>6.327.230.860</b>	<b>6.099.960.712</b>

Sumber : Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020

Total Alokasi Dana Desa (ADD) dari semua desa yang ada di Kecamatan Dempet yaitu sebesar Rp. 6.327.230.860. Desa Sidomulyo memperoleh dana desa tertinggi yaitu sebesar Rp. 504.600.911 dan desa dengan perolehan dana desa terendah yaitu Desa Botosengon sebesar Rp. 279.598.911.

Besaran ADD menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADD = \text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} + \text{ADDM}_{\text{Desa}} + \text{ADDP}_{\text{Desa}}$$

Besaran Alokasi Siltap Desa menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} = \text{Siltap Kades} + \text{Siltap Sekdes} + \sum \text{Siltap Perangkat Desa}$$

Alokasi Dana Desa Merata ( $\text{ADDM}_{\text{Desa}}$ ) menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM}_{\text{Desa}} = \text{ADDM}_{\text{Kecamatan Dempet}} + \text{ADDM}_{\text{Desa}} : 16 \text{ (Jumlah Desa)}$$

Alokasi Dana Desa ( $\text{ADDP}_{\text{Desa}}$ ) menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP}_{\text{Desa}} = \text{Bobot Desa} \times \text{ADDP}_{\text{Kecamatan Dempet}}$$

Bobot Desa menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Bobot}_{\text{Desa}} = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)$$

- a) Rasio jumlah penduduk (Z1) sebesar 10%
- b) Rasio jumlah rumah tangga miskin (Z2) sebesar 50%
- c) Rasio luas wilayah (Z3) sebesar 15%
- d) Rasio indeks kesulitan geografis (Z4) sebesar 25%.

#### 4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu Aparatur Desa di Pemerintah Desa se-Kecamatan Dempet. Gambaran mengenai data penyebaran kuesioner secara terperinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Penyebaran Kuesioner**

No	Desa	Jumlah Responden	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali	Kuesioner tidak kembali	Kuesioner yang diolah
1	Merak	5	5	5	0	5
2	Botosengon	5	5	5	0	5
3	Jerukgulung	4	5	4	1	4
4	Kunir	4	5	4	1	4
5	Brakas	5	5	5	0	5
6	Balerejo	4	5	4	1	4
7	Baleromo	5	5	5	0	5
8	Kedungori	5	5	5	0	5
9	Kuwu	3	5	3	2	3
10	Karangrejo	0	5	0	5	0
11	Kebonsari	4	5	4	1	4
12	Gempoldenok	4	5	4	1	4
13	Harjowinangun	4	5	4	1	4
14	Sidomulyo	0	5	0	5	0
15	Kramat	5	5	5	0	5
16	Dempet	5	5	5	0	5
Jumlah		62	80	62	18	62
Respon Rate		77,5%	100%	77,5%	22,5%	77,5%

*Sumber : Data Primer, diolah 2021*

Tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 80 buah, namun hanya kembali sebanyak 62 buah. Kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 18, hal ini karena terdapat beberapa aparatur yang belum bersedia memberikan atau mengisi kuesioner tersebut, serta terdapat beberapa kuesioner yang tidak lengkap.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 62 responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, lama masa bekerja, dan jabatan/pangkat. Pengelompokan responden akan tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	58	93,55
2	Perempuan	4	6,45
Jumlah		62	100

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 58 orang atau sekitar 93,55% sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 4 orang atau 6,45%. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 tahun	5	8,06
2	31-40 tahun	30	48,39
3	41-50 tahun	23	37,10
4	>50 tahun	4	6,45
Jumlah		62	100

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa jumlah responden dengan usia 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 8,06%, responden berusia 31-40 tahun sebanyak 30 orang

atau 48,39%, responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 23 orang atau 37,10%, serta responden dengan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 4 orang atau 6,45%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa usia responden paling banyak adalah berkisar antara 31 sampai 40 tahun.

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	10	16,13
2	SMP	18	29,03
3	SMA	21	33,87
4	S1	13	20,97
Jumlah		62	100

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa jumlah responden dengan riwayat pendidikan SD sebanyak 10 orang atau 16,13%, responden dengan riwayat pendidikan SMP sebanyak 18 orang atau 29,03%, responden dengan riwayat pendidikan SMA sebanyak 21 orang atau 33,87%, serta responden dengan riwayat pendidikan S1 sebanyak 13 orang atau 20,97%. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA.

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Bekerja**

No	Lama Masa Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1	<1 tahun	0	0
2	1-5 tahun	39	62,90
3	6-10 tahun	21	33,87
4	>10 tahun	2	3,23
Jumlah		62	100

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah responden yang sudah bekerja di pemerintahan desa kurang dari 1 tahun tidak ada atau 0%, responden yang sudah bekerja di pemerintahan desa selama 1 sampai 5 tahun sebanyak 39 orang atau 62,90%, responden yang sudah bekerja di pemerintahan desa selama 6-10 tahun sebanyak 21 orang atau 33,87%, dan responden yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di pemerintahan desa sebanyak 2 orang 3,23%. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa lama masa bekerja responden di pemerintahan desa paling banyak berkisar antara 1 sampai 5 tahun.

**Tabel 4.8**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	Jabatan/Pangkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Desa	14	22,58
2	Sekretaris Desa	14	22,58
3	Kepala Bagian Keuangan	14	22,58
4	Kaur Pemerintahan	13	20,97
5	Kaur Pembangunan	7	11,29
Jumlah		62	100

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjabat sebagai kepala desa sebanyak 14 orang atau 22,58%, responden yang menjabat sebagai sekretaris desa sebanyak 14 orang atau 22,58%, responden yang menjabat sebagai kepala bagian keuangan sebanyak 14 orang atau 22,58%, responden yang menjabat sebagai kaur pemerintahan sebanyak 13 orang atau 20,97%, serta



responden yang menjabat sebagai kaur pembangunan sebanyak 7 orang atau 11,29%.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standra deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Sum	Mean	Std. Deviasi
Kompetensi Aparat	62	8	27	35	1887	30,44	2,838
Pemanfaatan Teknologi Informasi	62	6	19	25	1408	22,71	1,731
Partisipasi Masyarakat	62	9	21	30	1620	26,13	2,639
Sistem Pengendalian Internal	62	4	16	20	1140	18,39	1,430
Penerapan Sanksi Administrasi	62	4	16	20	1153	18,60	1,520
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	62	6	14	20	1105	17,82	1,742

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah reponden penelitian (N) adalah 62. Variabel kompetensi aparat pengelola

dana desa memiliki skor terendah sebesar 27 dan skor tertinggi adalah sebesar 35, sehingga skor rata-rata pada variabel kompetensi aparat pengelola dana desa adalah sebesar 30,44, hal ini berarti bahwa rata-rata reponden memahami keterkaitan antara kompetensi aparat pengelola dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki skor minimum 19 dan skor maksimum 25, serta skor rata-rata pada variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 22,71, hal ini mengindikasikan bahwa responden cukup memahami dan mengerti tentang variabel pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat memiliki skor terendah sebesar 21 serta skor tertinggi sebesar 30, sehingga skor rata-rata pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 26,13. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa reponden memahami tentang partisipasi masyarakat berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal memiliki skor minimum 16, skor maksimum 20, serta skor rata-rata sebesar 18,39, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata reponden memahami keterkaitan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penerapan sanksi administrasi memiliki skor terendah 16 dan skor tertinggi 20, sehingga menghasilkan skor rata-rata variabel penerapan sanksi administrasi sebesar 18,60, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden

tentang penerapan sanksi administrasi berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki skor minimum sebesar 14 dan memperoleh skor maksimum sebesar 20 dari jawaban responden. Rata-rata skor jawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diperoleh dari responden adalah sebesar 17,82, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata reponden menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dempet dinilai cukup baik.

#### 4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

##### a) Hasil Uji Validitas

Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner (Rismawati, 2019, p:41). Suatu data dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada signifikansi 0,05 (Pahlawan et al., 2020:162-172). Berikut merupakan tabel hasil uji validitas data pada setiap variabel.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,735	0,207	Valid
	X1.2	0,835	0,207	Valid
	X1.3	0,825	0,207	Valid
	X1.4	0,742	0,207	Valid
	X1.5	0,810	0,207	Valid
	X1.6	0,780	0,207	Valid
	X1.7	0,827	0,207	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,765	0,207	Valid
	X2.2	0,707	0,207	Valid
	X2.3	0,778	0,207	Valid
	X2.4	0,683	0,207	Valid

	X2.5	0,558	0,207	Valid
Partisipasi	X3.1	0,864	0,207	Valid
Masyarakat (X <sub>3</sub> )	X3.2	0,835	0,207	Valid
	X3.3	0,817	0,207	Valid
	X3.4	0,836	0,207	Valid
	X3.5	0,888	0,207	Valid
	X3.6	0,829	0,207	Valid
Sistem	X4.1	0,871	0,207	Valid
Pengendalian	X4.2	0,820	0,207	Valid
Internal (X <sub>4</sub> )	X4.3	0,868	0,207	Valid
	X4.4	0,382	0,207	Valid
Penerapan Sanksi	X5.1	0,696	0,207	Valid
Administrasi (X <sub>5</sub> )	X5.2	0,869	0,207	Valid
	X5.3	0,820	0,207	Valid
	X5.4	0,791	0,207	Valid
Akuntabilitas	Y1.1	0,802	0,207	Valid
Pengelolaan	Y1.2	0,802	0,207	Valid
Dana Desa (Y)	Y1.3	0,751	0,207	Valid
	Y1.4	0,859	0,207	Valid

Sumber : Data primer, diolah 2021

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada masing-masing variabel dikatakan valid karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada signifikansi 0,05 (5%).

#### b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi atas jawaban kuesioner dari responden, dengan maksud apakah data kuesioner tersebut reliabel atau tidak. Reliabilitas diukur dengan melihat melihat hasil *Cronbach Alpha*, dimana suatu data dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Imam, 2018).

**Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	0,899	0,70	Reliabel

(X <sub>1</sub> )			
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>2</sub> )	0,734	0,70	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X <sub>3</sub> )	0,918	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>4</sub> )	0,711	0,70	Reliabel
Penerapan Sanksi Administrasi (X <sub>5</sub> )	0,802	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,815	0,70	Reliabel

Sumber : Data primer, diolah 2021

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian, dimana hasil dari *Cronbach Alpha* > 0,70 yang artinya bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

#### 4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji suatu nilai residual suatu model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nilai residual dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu dengan melihat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (Imam, 2018). Berikut merupakan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	62
Mean	0,000
Standar Deviasi	0,84797246
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,700
Signifikansi	0,712

Sumber : Data primer, diolah 2021

Tabel 4.12 merupakan hasil uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dimana berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar

0,712 yang mengindikasikan bahawa nilai residual dikatakan normal, karena telah memenuhi syarat uji normalitas yakni nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

#### b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel indenpen dalam suatu model regresi (Pahlawan et al., 2020:162-172). Jika tidak terdapat korelasi antar variabel independennya, maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini diketahui dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF). Tabel berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	0,207	4,824
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,123	8,133
Partisipasi Masyarakat	0,196	5,093
Sistem Pengendalian Internal	0,151	6,602
Penerapan Sanksi Administrasi	0,727	1,375

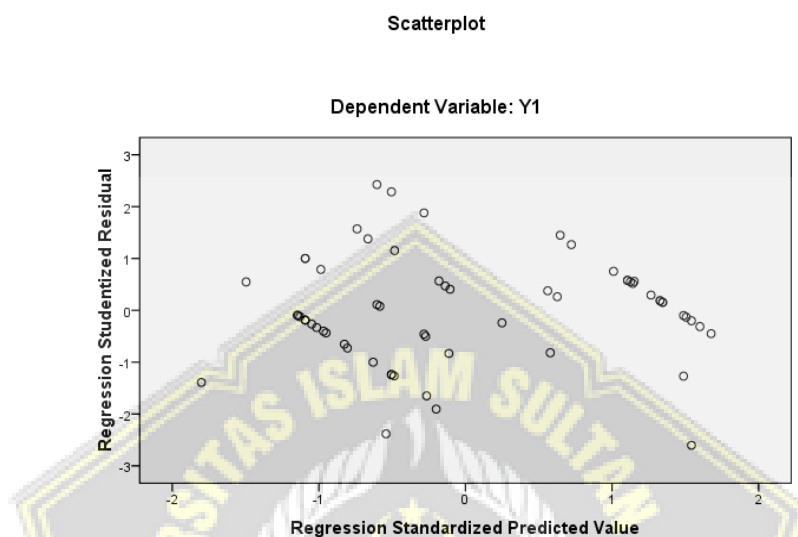
*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.13 merupakan hasil uji multikolinearitas. Apabila *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terdapat korelasi antar variabel independennya (Pahlawan et al., 2020:162-172). Dari hasil uji multikolinearitas tersebut diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variabel residual dalam suatu model regresi. Model regresi yang

baik yaitu apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarah et al., 2020:336). Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan software SPSS sebagai berikut.



**Gambar 4.1 Grafik *Scatterplot***

Gambar 4.1 merupakan grafik *Scatterplot* yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas ataupun dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang dipakai.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji regresi linear berganda .

**Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	t hitung	Signifikansi	Keterangan
-------	--------------------------------	-------------	--------------	------------

	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>			
Konstanta	0,452	1,860	0,243	0,809	
Kompetensi Aparat	0,338	0,088	3,853	0,000	Signifikan
Pemanfaatan IT	-0,776	0,187	-4,158	0,000	Tidak signifikan
Partisipasi Masyarakat	0,245	0,097	2,529	0,014	Signifikan
SPI	0,749	0,204	3,678	0,001	Signifikan
Penerapan Sanksi Administrasi	0,244	0,087	2,794	0,007	Signifikan

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.14 merupakan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disusun dalam persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,452 + 0,338 X1 - 0,776 X2 + 0,245 X3 + 0,749 X4 + 0,244 X5 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa :

- 1) Nilai Konstanta adalah sebesar 0,452 menjelaskan bahwa jika kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan penerapan sanksi administrasi nilainya 0, maka nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,452 satuan.
- 2) Nilai koefisien dari kompetensi aparat pengelola dana desa (X1) adalah sebesar 0,338 satuan dan bernilai positif. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan searah antara kompetensi aparat pengelola dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika variabel kompetensi aparat pengelola dana desa naik satu-satuan, maka akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,338 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.



- 3) Nilai koefisien dari pemanfaatan teknologi informasi (X2) adalah sebesar 0,776 satuan dan bernilai negatif. Koefisien negatif berarti bahwa terjadi hubungan tidak searah antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika variabel pemanfaatan teknologi informasi naik satu-satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami penurunan sebesar 0,776 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- 4) Nilai koefisien dari partisipasi masyarakat (X3) adalah sebesar 0,245 satuan dan bernilai positif. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan searah antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika variabel partisipasi masyarakat naik satu-satuan, maka akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,245 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- 5) Nilai koefisien dari sistem pengendalian internal (X4) adalah sebesar 0,749 satuan dan bernilai positif. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan searah antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika variabel sistem pengendalian internal naik satu-satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,749 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- 6) Nilai koefisien dari penerapan sanksi administratif (X5) adalah sebesar 0,244 satuan dan bernilai positif. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan searah antara penerapan sanksi administratif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika variabel penerapan sanksi administratif naik satu-

satuan, maka akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,244 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

#### 4.2.5 Uji Kebaikan Model

##### a) Uji Statistif F

Uji statistik F merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dapat dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen. Hasil pengujian F dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 4.15 Hasil Uji Statistif F**

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Signifikansi
Regresi	141,186	5	28,237	36,051	2,52	0,000
Residual	43,862	56	0,783			
Total	185,048	61				

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Hasil uji statistik F tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 36,051 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai F tabel, serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%), hal tersebut dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sanksi Administrasi bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

##### b) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan besaran variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Uji koefisien determinasi dapat diketahui dengan melihat nilai R square pada model regresi. Hasil pengujian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,873	0,763	0,742

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,763 hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 0,763 atau sebesar 76,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan penerapan sanksi administrasi sebesar 76,3%, sedangkan sisanya atau sebesar 23,7%, variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

#### **4.2.6 Uji Hipotesis**

##### **a) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji statistik t ini menggunakan signifikansi 0,05 (5%). Kriteria diterima ditolaknya suatu hipotesis yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% maka hipotesis

ditolak (Pahlawan et al., 2020:162-172). Berikut merupakan tabel hasil uji statistik t.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		t hitung	Signifikansi
	B	Std. Error		
Konstanta	0,452	1,860	0,243	0,809
Kompetensi Aparat	0,338	0,088	3,853	0,000
Pemanfaatan IT	-0,776	0,187	-4,158	0,000
Partisipasi Masyarakat	0,245	0,097	2,529	0,014
SPI	0,749	0,204	3,678	0,001
Penerapan Sanksi Administrasi	0,244	0,087	2,794	0,007

*Sumber : Data primer, diolah 2021*

Tabel 4.17 diatas menunjukkan hasil uji statistit t, dimana tingkat signifikansi variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan penerapan sanksi administrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil uji t pada varibel kompetensi aparat pengelola dana desa (X1) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,853 yang artinya bahwa lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,670, dengan signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka H1 diterima, artinya bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Hasil uji t pada varibel pemanfaatan teknologi informasi (X2) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -4,158 yang artinya bahwa kurang dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,670, dengan signifikansi 0,000. Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka H2 ditolak, artinya bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Hasil uji t pada variabel partisipasi masyarakat (X3) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,529 yang artinya bahwa lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,670, dengan signifikansi 0,014 atau kurang dari 0,05. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka H3 diterima, artinya bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Hasil uji t pada variabel sistem pengendalian internal (X4) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,678 yang artinya bahwa lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,670, dengan signifikansi 0,001 atau kurang dari 0,05. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka H4 diterima, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Hasil uji t pada variabel penerapan sanksi administrasi (X5) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,794 yang artinya nilai tersebut diatas nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,670, dengan signifikansi 0,007 atau kurang dari 0,05. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka H5 diterima, artinya bahwa penerapan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan  $t < \alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$ , serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,853 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,670 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima yang artinya, kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian yang hendaknya dimiliki oleh seorang aparatur desa, khususnya dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya. Jadi, apabila seorang aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai, maka mereka dapat menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, seperti pengelolaan dana desa yang dapat teralokasi secara optimal, dimana hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa.

Hasil ini sesuai dengan Teori Agensi yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat tercipta apabila terdapat faktor pendukung seperti kompetensi aparatur yang memadai. Tingginya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur desa tersebut. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur desa, maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta masyarakat lebih mempercayai tanggung jawab aparatur dalam mengelola dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perlu diperhatikan oleh aparatur desa untuk memenuhi harapan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pahlawan (2020), Atiningsih (2019), Sarah (2020), Fitrinanda (2020), Mada (2017), Ekasari (2017), Umaira

(2019), Aziiz (2019), Rismawati (2019) yang menjelaskan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4,158 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,670 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_2$  ditolak yang artinya, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penyebab belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala seperti jaringan internet yang masih belum optimal, serta kurangnya perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah dan melaporkan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan asumsi bahwa apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi naik satu-satuan, maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar satuan tersebut, serta variabel independen lain diasumsikan nilainya tetap (Pahlawan et al., 2020:162-172).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **4.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan  $t < \alpha$  yaitu  $0,014 < 0,05$ , serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,529 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,670 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_3$  diterima yang artinya, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena setiap keputusan yang hendak diambil oleh apatur desa sebaiknya melibatkan peran masyarakat. Masyarakat berhak memberikan argument kepada pemerintah desa khususnya dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut proses pembangunan desa. Dengan adanya peran aktif masyarakat diharapkan dapat menciptakan transparansi antara pihak aparaturnya desa dengan masyarakat.

Hasil ini sesuai dengan Teori Agensi yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan, baik keterlibatan dalam pengambilan keputusan, mengusulkan rencana anggaran, maupun memberikan penilaian atas pelaksanaan anggaran. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat, maka aparaturnya desa dapat mengetahui masalah maupun potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pahlawan (2020), Atiningsih (2019), Sarah (2020), Fitrinanda (2020), Mada (2017), dan Rismawati (2019)



yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan  $t < \alpha$  yaitu  $0,001 < 0,05$ , serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,678 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,670 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_4$  diterima yang artinya, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena efisiensi dan efektifitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu instansi maupun organisasi dapat meningkatkan mutu keamanan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi maupun instansi, seperti terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil ini sesuai dengan Teori Agensi, yaitu sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintahan yang berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan, serta mengukur sumber daya yang ada di suatu instansi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal, kegiatan pengelolaan keuangan pemerintahan, khususnya pemerintah desa dapat lebih akuntabel dan akurat, sehingga berimbas pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019), Arif Widyatama (2017), Aziiz (2019), dan Rismawati (2019) yang

mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **4.3.5 Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan  $t < \alpha$  yaitu  $0,007 < 0,05$ , serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,794 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,670 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_5$  diterima yang artinya, penerapan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena dalam tata kelola pemerintah desa diperlukan adanya ketentuan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pemerintah desa dapat berjalan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Dengan penerapan sanksi administrasi, pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa secara handal, sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil ini sesuai dengan Teori Agensi, yang menyatakan bahwa pemberlakuan sanksi administrasi dapat meminimalkan terjadinya risiko kecurangan, serta dengan penerapan sanksi administrasi juga dapat membantu aparatur desa agar memiliki sikap disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam mengelola dana desa untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lilis (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi sangat efektif diterapkan

oleh pemerintah desa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, seperti akuntabilitas publik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena jika seorang aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai, maka mereka dapat menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, seperti pengelolaan dana desa yang dapat teralokasi secara optimal, dimana hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja aparatur desa, namun sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi yang masih belum maksimum dapat menghambat proses pengelolaan hingga pelaporan desa desa, sehingga dapat berdampak pada menurunnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena dengan adanya peran aktif masyarakat diharapkan dapat menciptakan transparansi antara pihak aparatur desa dengan masyarakat, sehingga aparatur desa dapat mengetahui masalah

maupun potensi yang dimiliki masyarakat, serta dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena efisiensi dan efektifitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu instansi maupun organisasi dapat meningkatkan mutu keamanan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi maupun instansi, seperti terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Penerapan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena dengan penerapan sanksi administrasi yang baik, kegiatan pemerintah desa dapat berjalan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif, sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Dari lima variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel yang paling dominan adalah variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, berdasarkan hasil uji t dengan nilai  $t_{hitung}$  3,853 nilainya paling besar jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak yang terkait, antara lain:

1. Teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini mampu menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, serta penerapan sanksi administrasi.

## 2. Praktis

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini sebagai wacana dalam memaksimalkan peran aparatur desa, serta bagaimana sikap dan hal apa saja yang seharusnya dilakukan atau diterapkan agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai sarana dalam memperluas pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama kepada para aparatur pengelola dana desa.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengalami sedikit kendala yaitu sampel dalam penelitian masih belum sesuai dengan prakiraan sebelumnya serta belum menggunakan metode wawancara. Sampel penelitian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu aparatur desa yang terdiri dari beberapa desa di Kecamatan Dempet yang berjumlah 16 desa, namun dari jumlah desa yang sudah ditargetkan tersebut, hanya 14 desa yang bersedia untuk mengisi kuesiner serta 2 desa lainnya

masih belum bersedia untuk mengisi kuesioner karena masih dalam kondisi pandemi, sehingga data yang terkumpul hanya terdiri dari 14 desa.

#### **5.4 Agenda Penelitian Mendatang**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka agenda penelitian mendatang yaitu penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian serta dapat menerapkan metode wawancara jika kondisi sudah memungkinkan, karena hasil wawancara tersebut dapat digunakan sebagai data pendukung hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abarang, S. (2019). Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Demak Dalam Angka*. Bps.Go.Id. <https://demakkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/84746baeabd2865f6b696528/kecamatan-dempet-dalam-angka-2020.html>
- BPK, J. (2020). *Dana Desa di Kabupaten Demak Naik Rp 12 Miliar*. Jateng.Bpk.Go.Id. <https://jateng.bpk.go.id/dana-desadi-kabupaten-demak-naik-rp-12-miliar/#>
- Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya*.
- Fitrinanda, D. (2020). *The Effect Of Village Officers Competency, Public Participation, And Utilization Of Information Technology On Village Fund Management*. 2(2), 92–112.
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State*.
- Imam, G. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (ke-3)*. BP Universitas Diponegoro.
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate spss 25 (9th ed)*. Universitas Diponegoro.
- kemenkeu. (2020). *Anggaran Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2020*. Kemenkeu.Go.Id. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN* (pp. 1–8).
- PeraturanPemerintah. (2008). *Peraturan Pmerintah Nomor 60 Tahun 2008*



*Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

- Peraturan Pemerintah. (2014). UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Perbup. (2020). Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. *Human Relations*, 3(1), 1–8. [http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp\\_impact/pdfs/em\\_stakeholder\\_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa)
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*
- Saebani, Beni Achmad; Nurjaman, K. (2013). *Manajemen penelitian.*
- Saidah, L., & Taufiquachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan TRansparansi di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory.* Prentice Hall.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang.*
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi RdD* (pp. 61–63). Alfabeta.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wansyah, D. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Skpd Pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi.*
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>